

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KANTOR CAMAT

PANCUNG SOAL



LKPj 2025

**KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Kantor Camat Kecamatan Kecamatan Pancung Soal ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang dibuat oleh Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh oleh Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Pancung Soal. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2025. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Pancung Soal kepada para stakeholders selama tahun 2025. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Pancung Soal dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Inderapura, 23 Februari 2026
Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE.
NIP. 19680611 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun kesatu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 2 Sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pancung Soal dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

MISI 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi I sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)
Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	BB (77,0)		Diperlukan penguatan pada kualitas perencanaan kinerja, konsistensi indikator

2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86	91.40	pendukung, tindak lanjut LHE LKPj dan evaluasi internal Capaian indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,40 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap aspek pelayanan, produk layanan dan kompetensi petugas layanan.
3.	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Angka	75	30.0	Tingkat kematangan inovasi masih rendah dari target yang ditetapkan karena implementasi dan pengembangan inovasi belum optimal, baik dari aspek perencanaan, keberlanjutan maupun dampak inovasi maka diperlukan dorongan penguatan budaya inovasi, pendampingan teknis, seradukungan sumber daya manusia dan pendanaannya.

4.	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik $\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari yang di Evaluasi}} \times 100 \%$	Persen	82%	80%	Sebagian besar pemerintahan telah menunjukkan tata kelola administrasi dan kinerja yang baik namun masih diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas administrasi nagari agar target dapat tercapai sepenuhnya. Capaian indikator menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem berada pada nilai Nol persen yang berarti target telah tercapai, tidak terdapat penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kedepan perlu upaya untuk mempertahankan capaian melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemutakhiran data secara berkala. Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	Persen	0%	0%	Capaian indikator menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem berada pada nilai Nol persen yang berarti target telah tercapai, tidak terdapat penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kedepan perlu upaya untuk mempertahankan capaian melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemutakhiran data secara berkala. Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di
	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Jumlah Penderita Stunting	Persen	6,65%	2%	Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di

		$\frac{\text{Jumlah balita}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$				Kecamatan Pancung Soal, capaian ini masih perlu ditekan melalui intervensi gizi spesifik dan intensive, peningkatan pelayanan kesehatan, edukasi gizi keluarga serta penguatan konvergensi stunting.
7.	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	Persen	82%	100 %	Menunjukkan bahwa seluruh konflik yang dilaporkan telah berhasil diselesaikan, hal ini
		Jumlah Konflik yang dilaporkan				mencerminkan efektivitas koordinasi, mediasi dan peran aktif pemerintah kecamatan bersama pemangku kepentingan terkait. Kedepannya perlu dipertahankan melalui deteksi dini kerawanan konflik, penguatan komunikasi sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

i

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud dan Tujuan.....	1
1.3.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.4.	Landasan Hukum.....	6
1.5.	Sistematika Penyusunan.....	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1.	Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.2.	Rencana Kinerja.....	13
2.3.	Perjanjian Kinerja.....	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1.	Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	22
3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja	23
3.3.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	24
3.4.	Realisasi Anggaran	36

BAB IV PENUTUP 51

4.1.	Kesimpulan	51
4.2.	Saran	52

DAFTAR TABEL

No	Daftar tabel	Uraian	Halaman
1.	Tabel 1.1	Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Golongan Tahun 2025 Golongan Tahun 2025	4
2.	Tabel 1.2	Jumlah Pegawai dilingkungan Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	5
3.	Tabel 1.3	Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal	5
4.	Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	12
5.	Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	12
6.	Tabel 2.2.1	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pancung Soal tahun 2025	15
7.	Tabel 2.2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	16
8.	Tabel 2.2.3	Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029	17
9.	Tabel 2.2.4	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	18
10.	Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025	20
11.	Tabel 2.3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025	21
12.	Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	23
13.	Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025	23
14.	Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III) Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.	25
15.	Tabel 3.3.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024	28
16.	Tabel 3.3.3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya	28
17.	Tabel 3.3.4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	29
18.	Tabel 3.3.5	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya	30
19.	Tabel 3.3.6	Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024	31
20.	Tabel 3.3.7	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP	35
21.	Tabel 3.4.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	36

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Uraian	Halaman
1.	Gambar 1	Struktur Organisasi Kantor Camat Pancng Soal	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada tahun 2025 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. LKPj Bupati Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2025 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang

diamanatkan kepada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Pancung Soal terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat

kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

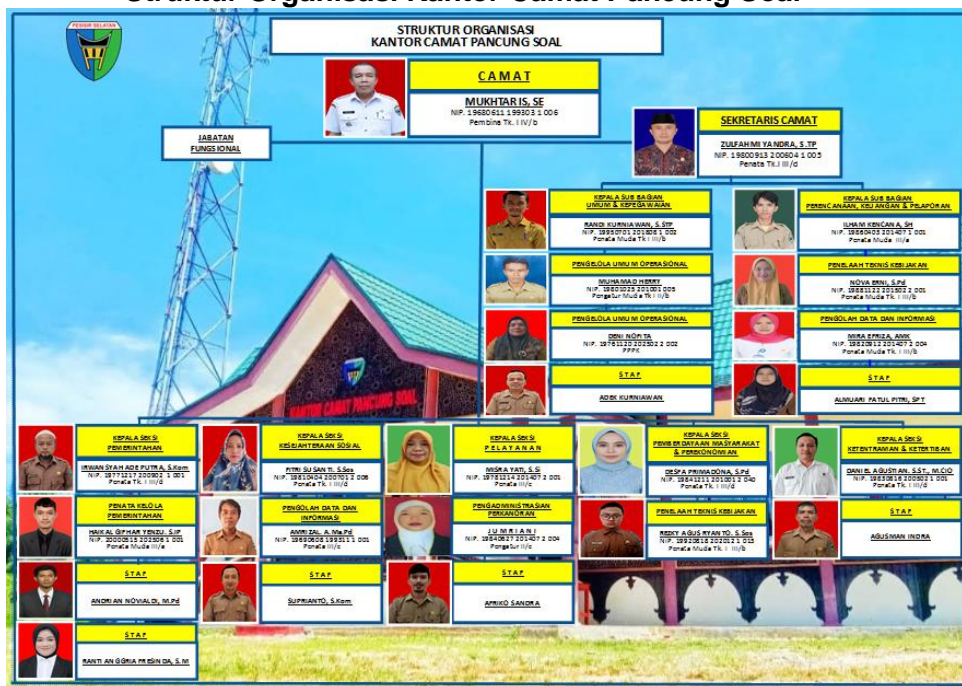
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Kantor Camat Pancung Soal



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	JABATAN	JUMLAH						
		Sukarela	Non PNS	I	II	III	IV	Total
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	-	3	3	-	6

11.	Honorir/Sukarela	2	5	-	-	-	-	7
JUMLAH		2	5	0	3	11	1	22

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pegawai/Jabatan	SMA	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	1		1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	1	1
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	1	-	1
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	3	-	3	-	6
11.	Honorir	3	-	3	1	7
JUMLAH		6	-	14	2	22

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Tabel 1.3
Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	S2	1	1	6,66%	14,28%
2	S1	11	3	73,33%	3,85%
3	D3	0	0	0%	0%
4	SLTA	3	2	20,00%	2,85%
5	SLTP	0	0	0%	0%
6	SD	0	0	0%	0%
JUMLAH		15	7	100%	100%

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Dari tabel 1.3 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA) yang memiliki prosentase yakni 73,33% dan 20,00%. Demikian juga dengan Non PNS, dengan tingkat pendidikan Stara I (S.1) sebanding dengan SLTA yakni sebanyak 3,85% dan 2,85%.

1.4 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan.
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Struktur Organisasi dan tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan hukum, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

DAFTAR LAMPIRAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

Rencana Pembangunan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra

Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta target sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Angka Kemiskinan Ekstrim.
	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Konflik Yang

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021- 2026 adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

2.1.2 Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Pesisir Selatan menjadi Sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestasi, Adaptif, dan Tangguh Bencana

2.2 Rencana Kerja

Kinerja pelayanan Kecamatan Pancung Soal dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pancung Soal, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat dan lain-lain). Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal meliputi :

- **Internal Kecamatan** : Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum** : Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat** : Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain** : Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.2.1
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pancung Soal tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	BB (77.00)		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86		
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	82%		
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%		
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,65%		
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%		

Tabel 2.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan	BB (77,00)	A (83,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	89	89	90	90
			Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	90	91	92	93
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja.	Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik.	82%	82	84	85	90
			Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,65%	5,5%	5%	4%	3%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%	85%	85%	90%	95%

Tabel 2.2.3
Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Persentase capaian kinerja Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai akip kecamatan	BB (77,00)	A (83,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (ikm)	86	89	89	90	90	90
				Nilai kematangan inovasi kecamatan	75	90	91	92	93	93
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari.	Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik.	82%	82	84	85	90	90
				Angka kemiskinan ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Prevalensi stunting (eppgbm)	6,65%	5,5%	5%	4%	3%	3%
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	82%	85%	85%	90%	95%	95%

Tabel 2.2.4.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.802.776.789
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.569.460
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.841.650
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.473.610
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.492.592.129
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.770.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.483.800
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.175.050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.128.610
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.098.297
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.275.750
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.154.160
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.272.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.366.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.087.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.719.004
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.799.269
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.050.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.720.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.434.000
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	450.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.984.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.002.850
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	999.850
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.003.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.148.740
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.148.740
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.121.500
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	21.277.500
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.844.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.240.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.240.000
JUMLAH	1.854.723.879

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai Evaluasi LAKIP	Skala	BB(77,0)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86
3.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase nagari yang memiliki administrasi baik	%	82%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	6,65%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	82%

2.3.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Formulasi
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skala	BB (77,0)	Nilai Evaluasi LAKIP
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	86	$\frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Pelayanan yang masuk}} \times 100\%$
3.	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	Nilai Kematangan
4	Persentase nagari yang memiliki administrasi baik	%	82%	$\frac{\text{Pembinaan yang Dilaksanakan}}{100\% \text{ Jumlah Nagari}} \times 100\%$
5	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	Persentase Angka kemiskinan
6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	6,65%	Penurunan Angka Stunting
7	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	82%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Konflik di selesaikan}} \times 100\%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja

kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun
2025**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.1

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025

NO	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi						
1.1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB (77,00)		

1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	86	91.40	106,28
1.3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	30,00	40%
1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	82%	80	97,56
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,41%	2%	>100
1.5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	80%	80	100

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (Tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator nilainya predikat **Baik**.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan

kinerja untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kantor Camat Pancung Soal sebagai salah satu perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemda Pesisir Selatan berkewajiban untuk membuat Capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)
Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	BB(77,0)		Diperlukan penguatan pada kualitas perencanaan kinerja, konsistensi indikator pendukung, tindak lanjut LHE LKPj dan evaluasi internal
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86	91.40	Capaian indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,40 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap aspek pelayanan, produk layanan dan kompetensi petugas layanan.
3.	Nilai kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Angka	75	30.0	Tingkat kematangan inovasi masih rendah dari target yang ditetapkan karena implementasi dan pengembangan inovasi belum optimal, baik dari aspek perencanaan, keberlanjutan maupun dampak inovasi maka diperlukan dorongan penguatan budaya inovasi, pendampingan teknis, serta dukungan sumber daya manusia dan pendanaannya.

4.	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari yang di Evaluasi}} \times 100\%$	Persen	82%	80%	Sebagian besar pemerintahan telah menunjukkan tata kelola administrasi dan kinerja yang baik namun masih diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas administrasi nagari agar target dapat tercapai sepenuhnya.
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	Persen	0%	0%	Capaian indikator menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim berada pada nilai Nol persen yang berarti target telah tercapai, tidak terdapat penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, kedepan perlu upaya untuk mempertahankan capaian melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemutakhiran data secara berkala.
	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	$\frac{\text{Jumlah Penderita Stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	Persen	6,65%	2%	Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di Kecamatan Pancung Soal, capaian ini masih perlu ditekan melalui intervensi gizi spesifik dan intensive, peningkatan pelayanan kesehatan, edukasi gizi keluarga serta penguatan konvergensi stunting.
7.	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{100\%} \times$	Persen	82%	100 %	Menunjukkan bahwa seluruh konflik yang dilaporkan telah berhasil diselesaikan, hal ini

		Jumlah Konflik yang dilaporkan				mencerminkan efektivitas koordinasi, mediasi dan peran aktif pemerintah kecamatan bersama pemangku kepentingan terkait. Kedepannya perlu dipertahankan melalui deteksi dini kerawanan konflik, penguatan komunikasi sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
--	--	--------------------------------	--	--	--	---

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2025;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang kuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB (77,00)	BB (75,60)*	98,18

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 masih dalam tahap penilaian. Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke Lima pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.3.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

1	Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB (75,00)	BB (74,53)	99,37	BB (75,00)	BB (76,22)	100,43	BB (75,00)	BB (75,60)	98,18
---	-----------------------------------	-------	------------	------------	-------	------------	------------	--------	------------	------------	-------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.3 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 (Satu) sebesar 98,18 %. pencapaian sasaran strategis 1 (satu) termasuk kategori keberhasilan **Sangat Memuaskan**.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pancung Soal pada tahun 2022 realisasinya 74,53 tahun 2023 realisasinya 76,22 dan tahun 2024 adalah 75,60 dengan kategori **BB**.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dapat tercapai. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2025 semua berjalan lancar.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.5
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB	BB	BB	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP kecamatan Pancung Soal , Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun

2023 dan 2024 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.6 dibawah ini :

Tabel 3.3.6
Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024

No	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi yang dinilai	Nilai	
		Bobot	2023		Bobot	2024
A	Perencanaan Kinerja	30,00	25,35	Perencanaan Kinerja	30,00	19,91
B	Pengukuran Kinerja	30,00	18,05	Pengukuran Kinerja	30,00	22,55
C	Pelaporan Kinerja	15,00	13,57	Pelaporan Kinerja	15,00	11,27
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,295	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,88
E						
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,22	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,60

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 19,91;

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah lengkap dan setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART dan menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu penetapan target kinerja “meningkatnya keterbukaan informasi publik” pada dokumen PK dan LKJ tidak selaras dengan dokumen Renstra.
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum didukung dengan notulen/laporan hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi

rencana aksi.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 22,55;

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 22,55 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan. Hal ini didukung dengan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja oleh Kecamatan Pancung Soal.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun masih terdapat hal yang mendapat perhatian yaitu mekanisme dalam mengumpulkan data kinerja yang dapat diandalkan belum terpenuhi karena SOP tentang pengumpulan data kinerja yang tidak update dan belum terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 11,27;

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,27 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dokumen pelaporan kinerja telah lengkap, telah direviu, telah dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja dan upaya perbaikan/ penyempurnaannya namun terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan LKj yaitu:

- 1) LKj belum menyajikan data dukung (sumber data) terkait kinerja yang dicapai sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Pada LKj dan IKU tidak ada dijabarkan formula untuk pencapaian kinerja.
 - 3) LKj tidak menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah (minimal periode renstra) untuk semua indikator kinerja.
 - 4) LKj belum menyajikan informasi analisis keberhasilan/kegagalan kinerja yang dicapai.
 - 5) LKj belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada aspek SOM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu dan lain-lain) penyajian efisiensi penggunaan sumber daya baru sebatas anggaran dan realisasi.
 - 6) Analisa LKj belum menyajikan analisis data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama (jika ada).
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 21,88:

1. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan telah terlaksananya capaian kinerja internal sesuai dengan SOP.
3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan

dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja namun belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKjIP) yang dilakukan terhadap Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat Pancung Soal beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

1. Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:
 - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;
 - Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya;
 - Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.
2. Selaraskan target kinerja yang ditetapkan dalam PK dengan target yang ditetapkan pada Renstra untuk sasaran kinerja "meningkatkan keterbukaan informasi publik".

2. Pengukuran Kinerja

Melakukan revisi terhadap SOP pengumpulan data kinerja dengan memuat mekanisme yang jelas untuk kondisi jika terjadi kesalahan data agar data yang disajikan dapat diandalkan.

3. Pelaporan Kinerja

- a) Sajikan pada LKj data dukung (sumber data) terkait kinerja yang dicapai sesuai dengan formulasi yang ditetapkan.
- b) Melengkapi perhitungan dan formula pencapaian kinerja pada IKU dan LKj.
- c) Sajikan pada LKj analisis dan evaluasi perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah (minimal periode renstra) untuk semua

indikator kinerja.

- d) Menampilkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD dan upaya perbaikan kedepan.
- e) Sajikan pada LKj analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada aspek SOM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu dan lain-lain).
- f) Sajikan pada LKj data pembandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan tingkat nasional/regional jika tidak ada indikator yang selaras dengan nasional/regional dijelaskan dalam LKj bahwa indikator yang digunakan berbeda dengan nasional/regional atau penjelasan lainnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menjadikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.7
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal	Skala	BB	BB	98,18	1.854.723.879	1.810.018.664	97,59	2,5%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

3.4 Realisasi Anggaran

Tabel 3.4.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Kewilayahan	Kec. Pancung Soal	Program/Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Pancung Soal	Bulan	12		1.802.776.789	1.759.674.848			
	1.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Bulan	12		1.492.592.129	1.458.977.434			
	1.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	Bulan	12	100	52.770.000	52.770.000	-		

2				Program/Keg Administrasi	Meningkatkan kualitas	Bulan	12	96.52	Rp143.024.430,00	Rp142.906.586,00			
---	--	--	--	--------------------------	-----------------------	-------	----	-------	------------------	------------------	--	--	--

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Umum Perangkat Daerah	pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Pancung Soal								
	2.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaannya bahan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100	2.098.297	2.098.297			
	2.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor	Bulan	12	100	2.275.750	2.275.750			
	2.3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	Bulan	12	100	19.154.160	19.154.160			
	2.4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	100	5.272.000	5.272.000			
	2.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	0	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.6			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan minum tamu	Bulan	12	99,82	9.900.000	9.882.799			
	2.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	96,83	61.365.500	59.423.184			
				Program/Keg Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaannya peralatan alat dan mesin untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja	Unit	1	88,75	14.087.500	12.500.000			
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	88,75	0	0			
3		Kewilayahan	Kec. Pancung Soal	Program/Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk penunjang pelayanan urusan administrasi kantor	Bulan	12	95,46	79.019,004	75.434.892			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan listrik dan air	Bulan	12	70,13	12.000.000	8.415.888			
	3.2			Penyediaan jasa pelayan umum kantor	Belanja jasa pelayanan umum	Bulan	12	100	66.719.004	66.719.004			
4		Kewilayahan	Kec. Pancung Soal	Program/Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	99,73	47.569.269	47.444.752			
	4.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kinerja dilapangan	Bulan	12	99,67	36.799.269	36.680.518			
	4.2			Pemeliharaan Peralatan dan	Terpeliharanya Peralatan gedung	Bulan	12	99,87	35.600.000	35.554.437			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Mesin Lainnya	kantor								
4.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	Bulan	12	99,91	6.720.000	6.714.234			
5	Perencanaan	Kec. Pancung Soal		Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Mewujudkan pembinaan masyarakat nagari	Nagari	10	100	19.002.850	17.515.499			
5.1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Mewujudkan pembangunan yang berkesenambungan	Usulan	21	100	999.850	999.850			
5.2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan membangun	Nagari	10	91,7	18.003.000	16.515.649			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					semangat olahraga								
6	Kewilayahan	Kec. Pancung Soal		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi dan pembinaan kewilayahan	Perse n	100	99,55	23.121.500	23.017.487			
6.1				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	Nagari	10	100	21.277.500	21.173.487			
6.2				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi	Nagari	10	100	1.844.000	1.844.000			

Keterangan:

- Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;**
- Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;**

3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2025; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Pancung Soal yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggarkan perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97.59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%), Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

3.4.1 Anggaran

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. Rp. 1.505.817.471,- (Satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Selanjutnya efisiensi pengurangan anggaran ditriwulan pertama maka diperubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) dimana anggaran Kecamatan Pancung Soal ada perubahan menjadi Rp. 1.492.592.129,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang mana realisasi belanja tahun ini sampai 31 Desember 2025 mencapai Rp. 1.456.977.434,- (97,61%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 43.117.715,- (2,39%), (SPj Fungsional per 31 Desember 2025 terlampir).

3.4.2 Realisasi

Pagu awal tersedia pada Belanja sebesar Rp. Rp. 1.505.817.471,- (Satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Selanjutnya diperubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) dimana anggaran Kecamatan

Pancung Soal ada perubahan menjadi Rp. 1.492.592.129,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai ASN yang mencakup gaji dan beberapa tunjangan ASN dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Anggaran sebesar Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggarkan perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97,59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%), Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.802.776.789,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.759.674.848,- (97,60%) dan sisa anggaran sebesar Rp.43.101.941,- (2,4%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.549.845.929,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.514.210.434,- (97,70%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.635.495,- (2,30%).

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.492.592.129,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.456.977.434,- (97,61%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.614.695,-

(2,39%), adapun anggaran yang tidak terealisasi disebabkan adanya purna tugas (Pensiun) atau mutasi jabatan berdasarkan pangkat dan golongan.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.770.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 52.770.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp.0,- (0%)

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan menunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 100.066.707,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 98.057.990,- (97,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.008.717,- (2,01%) dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.098.297,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.098.297,- (100%) .

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdiri dari Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 2.275.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.275.750,- (100%)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda-benda pos lainnya dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 19.154.164,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.154.164,- (100%) .

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.272.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.223.800,- (100%).

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.0,- terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%).

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.882.799,- (99,82%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 17,201- (0,18%).

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.366.500 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 59.432.184,- (96,84) dan sisa belanja Rp. 1.943.316,- (3,16%).

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan

Merupakan program untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 0,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 0,- (0%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 0,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 0,- (0%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%)

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi peralatan dan bahan penerangan gedung kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 79.019.004,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 75.434.892,- (95,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.584.112,- (4,54%) dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan menunjang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 8.415.888,- (70,13%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.584.112,- (29,9%).

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan kegiatan menunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.719.004,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 66.719.004,- (100%) .

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp.

47.569.269,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 47.444.752,- (99.73%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 124.517,- (0,87%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Merupakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 38.901.811,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.844.700,- (99.52%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 57.111,- (0.48%).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Merupakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk memenuhi peralatan pelayanan administrasi kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 6.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.250.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp.0,- (0%).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Merupakan kegiatan untuk pemeliharaan kebutuhan secara berkala pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.772.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.772.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0.0%).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Merupakan program bertujuan untuk program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 20.473.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.463.000,- (99.95%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.05%).

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Merupakan program bertujuan untuk kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 20.473.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.463.000,- (99.95%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.05%) sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Merupakan kegiatan untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Pancung Soal merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.340.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.340.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 15.133.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.123.000,- (99.93%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.07%).

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuang bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Pancung Soal, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. . 22.717.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 22.392.000,- (98.57%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,- (1.43%), dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Pancung Soal, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. . 22.717.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 22.392.000,- (98.57%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,- (1.43%), dengan kegiatan :

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-80 tahun 2025, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 19.717.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.417.500,- (98.48%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 300.000,- (1.42%).

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.975.000,- (99.17%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- (0.83%).

Selanjutnya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dimana anggaran yang dialokasikan banyak tidak terlaksana mengingat waktu tidak mengizinkan sehingga Program dan Kegiatan tertunda atau ditiadakan, dan akan lebih terinci dan tertera di lampiran LKPj, seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat dalam SPj Fungsional dan dalam Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2025 dengan keadaan per 31 Desember 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Pancung Soal Akhir Tahun Anggaran 2025 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang kami laksanakan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjalan cukup optimal meskipun masih terjadi beberapa permasalahan, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas kami di kecamatan. Di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator yang harus ditingkatkan adalah Kematangan Inovasi Daerah yang masih rendah, perlu kerjasama semua pihak yang terkait dengan inovasi sehingga dapat terlaksana dengan baik.
2. Capaian Indikator Kinerja
Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, Beberapa mencapai target dengan baik.
3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Anggaran sebesar Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggarkan perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta

delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97.59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%)

4.2 SARAN





Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Pancung Soal yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Pancung Soal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri, keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kecamatan Pancung Soal yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Pancung Soal Akhir Tahun Anggaran 2025, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Kecamatan Pancung Soal dalam periode lima tahun (2021 sampai dengan 2025) mendapatkan Penghargaan di beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut :

No.	Penghargaan				
	Nama	Pemberi	Pd/Badan Penerima	Tempat dan Tanggal	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1.	Terbaik IV Kategori Kecamatan Kualifikasi “Cukup Informatif “	Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, Desember 2022	
2.	Terbaik IV Kategori Kecamatan Kualifikasi “ Menuju Informatif “	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 22 Desember 2023	
3.	Terbaik II Lomba Bidang Pokja IV Jambore PKK Tk.Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 8 Juni 2024	
4.	Terbaik II Lomba Bidang Pokja IV Jambore PKK Tk.Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 8 Juni 2024	

5.	Kegiatan Khitanan Untuk Negeri 2024	Bakri Amanah” Lembaga Amil Zakat Nasional”	Kantor Camat Pancung Soal	Jakarta, 20 Desember 2024	
6.	Juara 3 Lomba Qasidah Rabana BKMT Festival Muharram 1447 H/ 2025 M	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 2025	
7.	Harapan I Lomba Mars Dasawisma	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 7 Oktober 2025	
8.	Terbaik II Lomba Storytelling/ Kader Bercerita	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Kantor Camat Pancung Soal	Painan, 7 Oktober 2025	

